

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas layanan publik adalah sesuatu yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan adanya pemerintahan yang akuntabel, masyarakat dapat mempercayakan atas apa yang diselenggarakan, direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Akuntabilitas itu sendiri pada sisi penilaian penyelenggaran merupakan komitmen yang dibuat oleh pemerintah dalam melayani public (Riantiano dan Azlina, 2012)

Menurut BPKP tahun 2011, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Kinerja menurut Bastian (2006) adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang di capai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Pelaporan kinerja ini dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja itu sendiri sangat penting di dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena terdapat penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcome* dan upaya untuk mendapat hasil yang lebih baik. Penanggungjawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan tingkat keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya (Endaryati, 2014). Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem dan menyampaikan pelaporan akuntabilitas adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yang pertama adalah anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah *performance based budgeting* yang merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* dan *outcome* dan berkaitan dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bawono, 2015). Dengan adanya penerapan anggaran berbasis kinerja pemerintah dapat menggunakan anggaran secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga tidak bisa lepas dari karakteristik hubungan anggaran dengan akuntabilitas pemerintah yaitu kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik sesuai dengan tujuan agar anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran juga mempunyai fungsi agar aparat menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah, sehingga tingkat kinerja dapat dicapai dengan maksimal.

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, gubernur dan bupati/walikota dapat menerapkan sistem pelaporan dan sistem pengendalian manajerial. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk dapat menilai kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah daerah harus dapat menyediakan informasi akuntansi yang akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam instruksi presiden republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikatakan bahwa untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme, dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Sistem pengendalian manajerial pada pemerintahan juga sangat diperlukan guna mendapatkan kinerja aparat pemerintah yang baik. Sistem pengendalian manajerial memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang

memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, kendala laporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap undang-undang. Dengan adanya pengendalian manajerial maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta mendapatkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diinginkan (Ramandei, 2009).

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya (Wulandari, 2018). Sistem informasi yang didukung Teknologi Informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri.

Penelitian terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti namun hasil penelitiannya belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Masparwati (2017); Dewi (2016); Komang dan Ari (2014); Krestiwawan dan Lucky (2015); Indriani Yulia (2015) menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Gayatri (2016); Raisa (2016); Endah Tri (2016); menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Masparwati (2017), Ida dan Gayatri (2016); Dewi (2016) melakukan penelitian pada faktor Kejelasan Sasaran Anggaran yang menunjukkan bahwa faktor tersebut memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan pada penelitian Angreini dan Sherly (2014) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Masparwati (2017) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pada Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan pada penelitian Agustin (2018) menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil lainnya pada penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Gayatri (2016) dan Chintya (2015) adalah pada faktor Sistem Pengendalian Manajerial menunjukkan bahwa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan beberapa penelitian juga menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Manajerial berpengaruh sangat baik di dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Chintya (2015) adalah melakukan penelitian pada faktor Pemanfaatan Teknologi Informasi yang menunjukkan bahwa faktor tersebut memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan pada penelitian Santoso (2016) menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil-hasil penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa tidak terdapat konsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini memotivasi diuji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya adalah Masparwati (2017), Herawati (2014) dan Intan Rohmawati (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan model penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Disamping itu penelitian ini menggunakan objek penelitian yang belum pernah dilakukan yaitu pada

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kendal.

1.2. Rumusan Masalah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik masyarakat dapat mempercayakan atas apa yang diselenggarakan, direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah setempat (Rianto dan Azlina, 2012). Penelitian tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, seperti akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dipengaruhi oleh anggaran berbasis kinerja (Riski Masparwato, 2017; Bahri, 2012; Endaryani 2014; Friska; 2014), Kejelasan Sasaran Anggaran (Masparwati, 2017; Banjar, 2017; Fauzan, 2017), Sistem Pelaporan (Masparwati, 2017; Fauzan, 2017; Herawati, 2012), Sistem Pengendalian Manajerial (Ida, 2016; Kaltsum, 2003; Ramandei, 2009), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (Azwir, 2015; Chintya, 2015; Zodia, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

3. Bagaimana pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
4. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian manajerial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
5. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian manajerial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Serta melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan jumlah faktor-faktor dalam variabel yang lebih banyak jumlahnya dan beragam macamnya. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Bagi Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi SKPD Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, sistem pengendalian manajerial dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar terciptanya kinerja pemerintah yang baik